

Women's leadership training in political contestation for the Muhammadiyah student association at Takalar Regency

Andriana✉, Sitti Rahmawati Arfah, Nur Wahid, Syukri, Indri Apriani Nur
Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

✉ andriana@unismuh.ac.id

🌐 <https://doi.org/10.31603/ce.11730>

Abstract

This service activity aims to increase women's knowledge and leadership skills in political contestation. The method used in this activity is carried out in three stages, namely 1) preparation by socializing the activity to the community, 2) implementation is carried out by means of training, and 3) evaluation is carried out by distributing pre-test and post-test questionnaires to measure the level of knowledge and skills of partners regarding the leadership training of women in political contestation that has been carried out. The results of this service show that cadres have increased their knowledge and skills regarding women's leadership training with a percentage of 93.21% in the good category. This shows that there are differences in the level of community knowledge after being given women's leadership training which is increasing.

Keywords: *Leadership; Woman; Political contestation*

Pelatihan kepemimpinan perempuan dalam kontestasi politik bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Takalar

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan perempuan dalam kontestasi politik. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni 1) persiapan dengan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, 2) pelaksanaan dilakukan dengan cara pelatihan, dan 3) evaluasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pengetahuan dan keterampilan mitra atas pelatihan kepemimpinan perempuan dalam kontestasi politik yang telah dilakukan. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa kader mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang pelatihan kepemimpinan perempuan memiliki presentase sebesar 93,21% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat setelah diberikan pelatihan kepemimpinan perempuan semakin meningkat.

Kata Kunci: Kepemimpinan; Perempuan; Kontestasi politik

1. Pendahuluan

Keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik sangat penting untuk ditingkatkan dalam upaya mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai kesetaraan gender. Peraturan UU No 10 Tahun 2008 yang mewajibkan partai politik untuk menyertakan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat namun belum mencapai hasil maksimal. Syarat tersebut harus dipenuhi partai politik agar dapat ikut

serta dalam Pemilu. Posisi perempuan sangatlah penting dalam dunia politik, keterwakilan pengambilan keputusan yang berpihak kepada kaum perempuan (Priandi & Roisah, 2019). Dalam panggung politik baik nasional maupun lokal, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek. Namun, partisipasi politik perempuan hingga kini masih cenderung rendah. Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik disebabkan oleh kendala kultural, struktural dan anggapan-anggapan yang bias gender yang terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat luas, namun juga di kalangan politik dan pemerintahan itu sendiri (Fauziah et al., 2023). Keterwakilan perempuan di wilayah legislatif yakni pada Pemilu 2009, 18% dan puncaknya pada periode 2019-2024 yakni menyentuh 20,5% perempuan (Kurniawan, 2019).

Budaya patriarki dalam politik memang menjadi salah satu kendala utama bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kontestasi politik. Persepsi bahwa politik adalah ruang publik yang tabu bagi perempuan memperkuat hambatan-hambatan struktural dan kultural yang sudah ada. Perempuan dianggap lebih cocok mengurus wilayah domestik (*private*) sementara laki-laki untuk wilayah publik masih menjadi paham klasik sebagian masyarakat (Effendi, 2003). Selain itu budaya patriarki yang melekat kuat membuat eksistensi kaum perempuan cenderung dilihat sekedar lumbung suara semata dan pemenuhan kuota 30% perempuan di kepengurusan partai dan proses kandidasi di level legislatif (Mayrudin et al., 2023). Selain itu, budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat Bugis Makassar mempengaruhi ketatnya ruang sosial bagi perempuan, termasuk dalam bidang politik dan kepemimpinan. Budaya ini menekankan peran tradisional perempuan dalam ranah domestik dan cenderung membatasi partisipasi mereka dalam ranah publik.

Peran perempuan dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Takalar menghadapi beberapa tantangan termasuk kurangnya program untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan seperti pelatihan keterampilan kepemimpinan, struktur organisasi yang belum fleksibel terhadap kebutuhan perempuan, serta norma budaya yang konservatif membuat perempuan merasa tidak didukung dan norma sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam organisasi. Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi pemimpin pada organisasi otonom Muhammadiyah termasuk IMM Kabupaten Takalar diharapkan dapat melakukan perubahan yang berkesinambungan untuk meningkatkan sumber daya insani untuk mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah. Sebagai organisasi otonom, juga tidak terlepas dari bagaimana dalam pembinaan mahasiswa, serta pemuda dan generasi muda Indonesia pada umumnya. Mahasiswa sebagai masyarakat intelektual yang diharapkan mampu mengubah masa depan bangsa menjadi lebih baik. Kedaulatan politik berada di tangan rakyat. Untuk merealisasikan kedaulatan rakyat diperlukan perwakilan politik yang dibentuk melalui pemilihan umum (Pemilu).

Pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk menghasilkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peran politik perempuan dalam ruang publik. Dalam pelatihan kepemimpinan perempuan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi, memperkuat organisasi dan berkontribusi bagi kemajuan umat dan bangsa. Program ini diharapkan memberikan kontribusi luas pada masyarakat dan perguruan tinggi untuk meningkatkan keterampilan yang profesional dalam bidang kepemimpinan perempuan di IMM Kabupaten Takalar.

2. Metode

Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan persyarikatan dilaksanakan pada hari Rabu, 3 April 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melalui metode pelatihan partisipatif dan pendampingan.

2.1. Perencanaan

Sebelum melaksanakan pelatihan, tim pengabdian kepada masyarakat di lingkungan persyarikatan terlebih dahulu melakukan perencanaan dengan pendekatan *focus group discussion* (FGD). Kegiatan ini dimanfaatkan untuk pengenalan dan penyampaian tujuan kegiatan, tahapan pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan.

2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut kegiatan perencanaan guna mencapai tujuan kegiatan PkM. Pelaksanaan PKM secara ideal yaitu yaitu melakukan sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan pengembangan kegiatan (Arfah et al., 2022). Lokasi pelaksanaan PkM di lingkungan persyarikatan yaitu di Aula Pusat Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Takalar. Selama kegiatan berlangsung, peserta mitra melakukan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur dan melihat kemampuan peserta pelatihan sehingga setelah adanya pendampingan ini wawasan serta kemampuan dapat bertambah dan meningkat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pengabdian ini.

2.3. Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan PkM ini merupakan kegiatan terakhir (Muhdiyanto & Pramita, 2018). Evaluasi dalam kegiatan ini adalah mencoba menelaah kembali capaian PkM di lingkungan persyarikatan yang disandingkan dengan tujuan awal kegiatan PkM ini dengan membuat *pre-test* dan *post-test* terkait pelatihan kepemimpinan perempuan dalam kontestasi politik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan kegiatan

Pemberian pelatihan dilakukan dengan metode yang bervariasi dalam menyampaikan materi (Gambar 1). Kegiatan PkM ini terdiri dari dua materi. *Pertama*, materi dinamika kepemimpinan perempuan disampaikan oleh Andriana, S.IP., M.Si. Materi ini mencakup aspek sosial politik kepemimpinan perempuan, potensi dan peluang kader serta kesadaran politik. Setelah penyampaian dari pemateri pertama, para peserta diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan diskusi. Kegiatan ini berlangsung dengan antusias karena penyampaian materi tidak monoton dan diikuti dengan pemberian praktik.

Kedua, materi kepemimpinan terkait peran perempuan dalam kontestasi politik yang disampaikan oleh Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si. Pemberian materi menggunakan metode ceramah dan diskusi ini dapat memotivasi, menstimulus kreativitas, meningkatkan kemampuan. Teknik ini menggunakan *brainstorming* (berbagi pendapat) dimana menggunakan kertas *flipchart* yang ditulis pada papan dan dengan mempelajari langkah analisis atau melatih keterampilan tertentu (Gambar 2). Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini terkait peran kepemimpinan perempuan dalam Muhammadiyah, hak-hak politik dan partisipasi politik.



Gambar 1. Penyampaian materi pelatihan



Gambar 2. Kegiatan pemberian *brainstorming*

Kegiatan ini diawali dengan *pre-test* dan diakhiri dengan *post-test*. *Pre-test* untuk mengetahui pengetahuan dasar peserta kader tentang perspektif peran kepemimpinan perempuan, sedangkan *post-test* untuk melihat apakah pengetahuan, pemahaman dan keterampilan peserta mengalami peningkatan. Kegiatan ini ditutup dengan pemberian sertifikat kepada para pemateri dan foto bersama.

3.2. Evaluasi kegiatan pengabdian

Selama pelatihan berlangsung, tim pengabdian PKM membuat *pre-test* dan *post-test* terkait pelatihan kepemimpinan perempuan dalam kontestasi politik. Berdasarkan hasil angket menunjukkan bahwa pengetahuan tentang (1) Kepemimpinan Perempuan dalam Muhammadiyah, (2) Hak-hak Politik Perempuan, dan (3) Partisipasi Politik Perempuan cenderung mengalami peningkatan pemahaman, sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi pelaksanaan PkM

No.	Indikator	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
1	Kepemimpinan Perempuan dalam Muhammadiyah	95,42%	98,20%	2,78%
2	Hak-hak Politik Perempuan	81,57%	91,32%	9,75%
3	Partisipasi Politik	80,16%	90,12%	9,96%
	Rata-Rata	85,71%	93,21%	7,50%

Peningkatan pengetahuan peserta tentang kepemimpinan perempuan dalam Muhammadiyah setelah pelatihan sebesar 2,78%, artinya peserta sudah memahami bahwa komitmen organisasi mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam ruang publik. Selain itu, peningkatan pengetahuan peserta tentang kepemimpinan perempuan dalam Muhammadiyah setelah pelatihan sebesar 9,75%, artinya peserta mengalami peningkatan kesadaran bahwa aktivitas politik tidak hanya menyangkut kekuasaan dan jabatan, tetapi juga berkaitan dengan cita-cita dan tindakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Pemahaman tersebut diperkuat oleh peningkatan pengetahuan tentang partisipasi politik sebesar 9,96% setelah pelatihan, yaitu pada pengetahuan tentang pentingnya perempuan memegang jabatan dalam ruang publik. Model partisipasi politik yang konvensional hanya memilih pada pemilu dan mengamati kampanye pemilu. Dalam hal ini partisipasi politik yang tidak konvensional yakni keterlibatan dalam gerakan perempuan, aktivitas organisasi publik, dan aktivis organisasi politik dan pemerintahan. Partisipasi politik ini didukung oleh keterlibatan kader pada organisasi-organisasi di sekolah, perguruan tinggi dan di luar perguruan tinggi baik sebagai pengurus, maupun anggota IMM, OSIS, BEM dan lainnya.

Oleh karenanya penting memperkuat kepemimpinan perempuan khususnya di IMM Kabupaten Takalar yang semakin dinamis. Tentu pendidikan politik bagi perempuan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Keberlanjutan ini perlu dilakukan bagi perempuan untuk mempersiapkan mereka menjadi partisipan dalam kontestasi politik. Partisipan dalam kontestasi politik yang cerdas sekaligus dengan representasi peran perempuan yang tinggi. Kegiatan pelatihan ini berhasil mendapatkan antusias dan perhatian para peserta dan komitmen peningkatan peran perempuan dalam kontestasi politik sebagai aktor penggerak misi dakwah dapat terbangun bersama.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian pelatihan kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan perguruan Muhammadiyah Kota Makassar berjalan dengan baik. Terdapat peningkatan tingkat pengetahuan kader perempuan pada IMM Kabupaten Takalar mengenai kepemimpinan perempuan dalam Muhammadiyah, peningkatan tingkat pemahaman hak-hak politik perempuan, dan peningkatan partisipasi politik dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat pengetahuan kader setelah diberikan pemahaman kepemimpinan perempuan dalam kontestasi politik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan persyarikatan ini dapat terlaksana dengan baik atas bantuan pendanaan yang diberikan pada Program RisetMU Batch VII Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Ucapan terima kasih juga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Ketua Lembaga Penelitian

Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Perguruan Muhammadiyah Kota Makassar.

Kontribusi Penulis

Pelaksana kegiatan: A, SRA, NW, S, IAN; Penyiapan artikel: A, SRA; Analisis dampak pengabdian: A, SRA; Penyajian hasil pengabdian: A, SRA, NW; Revisi artikel: SRA.

Daftar Pustaka

- Arfah, R., Syarif, A., & Suhaeman, I. (2022). Kelompok Pengrajin Limbah Pisang di Desa Bongki Lengese Kabupaten Sinjai. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(3), 473–480.
- Effendi, G. A. (2003). *Filsafat Berperspektif Feminis*. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
- Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 12–22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>
- Kurniawan, A. (2019). Anggota Perempuan Capai 20,5 Persen, DPR akan Perjuangkan Isu Gender. In *Kompas*.
- Mayrudin, Y. M., Utami, W. K., & Irawan, P. (2023). Dinamika Politik Catch-all atas Eksistensi Perempuan di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Banten. *Jurnal Transformatif*, 9(2), 127–145. <https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2023.009.02.1>
- Muhdiyanto, M., & Pramita, Y. D. (2018). Pendampingan bagi BUMDes Pagersari, Mungkid Guna Mewujudkan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Community Empowerment*, 3(2), 54–57. <https://doi.org/10.31603/ce.v3i2.2454>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
